

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sampah

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (SNI 19-2454-2002). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 meliputi :

a. Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

b. Sampah Sejenis Rumah Tangga

Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau lainnya.

c. Sampah Spesifik

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi :

- Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
- Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun

- Sampah yang timbul akibat bencana
- Puing bongkaran bangunan
- Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

2.2 Sumber dan Timbulan Sampah

Damanhuri (2011), menyatakan bahwa timbulan sampah adalah jumlah rata-rata sampah yang dihasilkan setiap orang dalam sehari. Timbulan sampah bisa dinyatakan dengan satuan volume atau satuan berat. Jika digunakan satuan volume, derajat pepadatan (densitas sampah) harus dicantumkan. Prassojo *et al* (2014), menyatakan jumlah timbulan sampah di sangat penting untuk mengetahui jumlah peralatan yang diperlukan untuk merencanakan jumlah fasilitas pengelolaan sampah dan rute pengumpulan.

Timbulan sampah Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sebesar 314.422 m³/tahun yang berasal dari permukiman, industri, pasar, fasilitas umum dan sebagainya. Soemirat (2006) menyatakan bahwa kualitas dan kuantitas sampah dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi jumlah timbulan sampah diantaranya :

- Jumlah penduduk

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya berbanding lurus dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.

- Keadaan sosial ekonomi masyarakat

Pola hidup konsumtif akibat kenaikan sosial ekonomi masyarakat menghasilkan timbulan sampah dengan karakteristik sampah yang beragam

- Kemajuan teknologi

Penggunaan bahan baku, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas produksi sampah.

Berdasarkan pengelolaan sampah di Indonesia, sumber sampah terbagi atas:

- a. Permukiman atau rumah tangga dan sejenisnya
- b. Pasar
- c. Kegiatan komersial seperti pertokoan
- d. Kegiatan perkantoran
- e. Hotel dan restoran
- f. Kegiatan dari institusi seperti industri, rumah sakit
- g. Penyapuan jalan
- h. Taman-taman.

2.3 Komposisi Sampah

Komposisi sampah dinyatakan dalam % berat basah atau % volume basah. Data komposisi sampah penting untuk mengevaluasi peralatan yang diperlukan, sistem, program dan rencana manajemen persampahan suatu kota (Damanhuri, 2011). Karakteristik sampah di Kabupaten Kudus sebagian besar terdiri dari sampah organik

yang mencapai 72% dari timbulan sampah yang dihasilkan. Adapun komposisi timbulan sampah yang ada di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Prosentase Komposisi Sampah di Kabupaten Kudus Tahun 2019

No	Jenis Sampah	Presentase
1	Organik	73%
2	Kertas	8%
3	Plastik	9%
4	Kayu	3%
5	Logam	2,1%
6	Kain/Tekstil	1,5%
7	Karet dan Kulit	1%
8	Kaca	1,2%
9	Lain-lain	1,2%
Total		100%

Sumber : Dinas Permukiman Kawasan Perumahan, dan Lingkungan Hidup Kab. Kudus, 2019

Komposisi sampah setiap kota atau negara berbeda tergantung dengan tingkat ekonomi suatu kota atau negara tersebut. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat perekonomian suatu kota atau negara, maka jenis sampah organik akan semakin menurun, sedangkan sampah anorganik yang meliputi kertas, plastik, kaca dsb akan semakin meningkat. Komposisi sampah juga berpengaruh pada pola penanganan sampah pada sumber sampah. Apabila sampah yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, akan lebih mudah untuk dilakukan pemilahan sampah dan adanya proses pengomposan (Dirjen Cipta Karya, 2011).

2.4 Pengelolaan Sampah

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pendauran ulang (*recycle*), sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Kudus telah membuat Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Sampah. Hasil dari retribusi pelayanan sampah diharapkan mampu untuk menunjang biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. Berdasarkan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (2011), pengelolaan sampah terdiri dari 5 aspek yaitu :

1. Aspek Teknis Operasional

Sub sistem teknik operasional Bank Sampah memiliki beberapa komponen komponen meliputi pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan.

- Pewadahan

Pewadahan sampah di Kecamatan Bae dan Kecamatan Gebog berupa keranjang yang terbuat dari anyaman plastik. Sedangkan untuk fasilitas umum pewadahan menggunakan tong plastik. Saat ini, penduduk Kecamatan Bae dan Kecamatan Gebog sebagian besar belum melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya, dilihat dari banyaknya sampah yang tercampur.

- Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengumpulan sampah kota pada sumber sampah, dan membawa sampah ke TPS/Bank Sampah yang telah disediakan. Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan dengan menggunakan gerobak, becak dan motor sampah. Selain itu, kegiatan pengumpulan juga dapat dilakukan langsung secara individu ke TPS/Bank Sampah. Kondisi topografi Kecamatan Bae cenderung datar, penggunaan alat pengumpul sampah tersebut dinilai lebih efektif karena dapat menjangkau gang-gang kecil perumahan.

- Proses Pengangkutan

Sampah yang sudah dipilah sesuai jenisnya, sebagian dikelola untuk dijadikan bahan kreasi dan sisanya diangkut melalui gerobak, becak dan motor sampah menuju Pengelolaan Sampah Non Formal (Pengepul) terdekat.

- Proses Pengolahan

Proses pengolahan sampah yang secara umum diterapkan di Bank Sampah Kabupaten Kudus diantaranya :

- Pengomposan (*composting*)

Pengomposan adalah proses dekomposisi dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme terhadap bahan organik yang *biodegradable* atau biomas. Proses dekomposisi (penguraian) bahan organik dapat berlangsung secara anaerobik dan aerobik, tergantung dari ketersediaan oksigen. Proses pembuatan kompos dipengaruhi oleh beberapa parameter diantaranya C/N ratio, kadar air, suhu, pH, kontraksi oksigen dan lain sebagainya (Damanhuri, 2011).

Bank sampah Tunjung Seto dan Muria Berseri merupakan bank sampah yang sudah melakukan pengolahan sampah organik, dimana sampah tersebut didegradasi dengan bantuan manggot/ Lalat *Black Soldier Fly* (BSF). Menurut Penasihat Kebijakan Lingkungan *Zero Waste Scotland*, budidaya lalat BSF memiliki kontribusi yang besar bagi lingkungan juga perekonomian di Skotlandia. Dimana lalat tersebut memberikan manfaat ganda kepada masyarakat yaitu mereduksi limbah organik dan menjadi bahan baku dalam mendukung ketersediaan pakan ikan dan ternak (Admin, 2019).

- Kreasi Sampah

Sampah anorganik yang sudah dipilah, kemudian dimanfaatkan menjadi barang kerajinan yang bermanfaat yang memiliki nilai ekonomi meliputi tas, dompet, vas bunga, gantungan kunci dan lain-lain.

2. Aspek Kelembagaan

Sub sistem ini menitikberatkan pada aspek kelembagaan atau organisasi, yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan sampah atau institusi yang mengatur, merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan persampahan. Institusi yang berfungsi sebagai operator persampahan adalah UPT Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup.

Sub sistem ini menitikberatkan pada aspek kelembagaan atau organisasi, yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan bank sampah yang mengatur, merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan bank

sampah. Berdasarkan UU No 18 tahun 2008 dalam menerapkan 3R dapat dilakukan dengan cara kerjasama antara warga, pihak manajemen dan pemerintah setempat. Dalam pembentukan bank sampah, pengurus bank sampah bekerja sama dengan Pemerintah Desa setempat dan Dinas PKPLH Kab. Kudus. Selain itu, Dinas PKPLH juga bertindak sebagai pengawas atas pengelolaan bank sampah.

3. Aspek Pembiayaan

Sub sistem pembiayaan memiliki tujuan untuk mengatur aspek pendanaan / pembiayaan dalam pengelolaan Bank Sampah. Pembiayaan pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Kudus didapatkan dari hasil penjual kerajinan sampah, serta bantuan dana dari Pemerintah dan instansi terkait.

Menurut Shimaoka (2012), sampai saat ini tidak ada peraturan teknis mengenai sistem akuntansi untuk kota dalam menerapkan akuntansi manajemen biaya persampahan. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan sistem akuntansi biaya layanan pengelolaan sampah yang efektif dan cocok untuk diterapkan di kota-kota besar di Indonesia yang memiliki masalah persampahan yang lebih kompleks.

4. Aspek Hukum

Sub sistem ini mengacu pada bidang perundang-undangan, penegakan hukum, penentuan kebijakan dan upaya-upaya lainnya yang menyangkut aspek hukum dan pengaturan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dalam pengelolaan persampahan. Pengelolaan sampah

di Kabupaten Kudus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 04 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Efisiensi operasional pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi dari instansi kota dan warga negara, oleh karena itu, aspek sosio kultural berupa kesadaran dan peran serta masyarakat merupakan salah satu pihak yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kurangnya pengetahuan tentang undang-undang terkait oleh petugas kesehatan merupakan salah satu contoh ketidaksesuaian (Moreira, 2012).

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Sub sistem peran serta masyarakat dan swasta mencakup pada sistem mekanisme pengawasan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga pendanaan. Peran serta masyarakat lebih mengarah pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan aspek finansial dalam pengelolaan sampah, sedangkan pihak swasta terarah pada keterlibatan dalam pendanaan (Syahriartato, 2013). Peran serta masyarakat di Kecamatan Bae dan Kecamatan Gebog dilakukan dengan kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan dengan frekuensi pelaksanaan antara 1-2 kali per bulan. Selain itu masyarakat Kecamatan Bae dan Kecamatan Gebog juga berperan dalam mereduksi sampah dengan pembentukan Bank Sampah Tunjung Seto.

Menurut Lin *et al* (2017), partisipasi masyarakat yang lebih baik didapat dicapai dengan memberikan informasi yang lebih baik, memperbaiki pengumpulan sampah dan fasilitas pembuangan, iklan publik dan peraturan masyarakat. Metode pemisahan / daur ulang yang nyaman dan akses mudah

ke fasilitas limbah paling efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, perilaku ramah lingkungan dalam keluarga dan komunitas memotivasi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat digunakan model persamaan struktural untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kemauan warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan limbah, dan menunjukkan bahwa faktor yang paling penting adalah pengetahuan warga negara, diikuti oleh motivasi sosial, sementara faktor kelembagaan memiliki dampak terkecil. Warga negara yang mendapat informasi lebih baik dan tinggal di komunitas dengan perilaku yang lebih ramah lingkungan memiliki kecenderungan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengelolaan limbah berkelanjutan (Lin *et al*, 2017).

2.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah

2.5.1 Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah :

- Tersedianya peraturan hukum di tingkat daerah yang mengatur keterlibatan pemerintah, masyarakat sektor informal dan swasta/pengusaha dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan persampahan.
- Program *green & clean* dari pemerintah daerah yang melibatkan semua masyarakat.

- Kegiatan penyuluhan dan kampanye mengenai pengelolaan sampah terpadu kepada masyarakat oleh instansi terkait
- Dukungan dari *stakeholder* dalam pengelolaan sampah terpadu.

2.5.2 Faktor penghambat

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah :

- Menggunakan paradigma konvensional mengenai sampah “ambil-angkut-buang”.
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang mengelola sampah secara 3R masih minim.
- Tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang belum optimal dikarenakan keterbatasan sarana, prasarana, biaya serta personal (Bukori, 2014).

2.6 Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) adalah sistem pengelolaan sampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dimana kegiatan perencanaan, penyusunan, operasional dan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat. Tujuan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat adalah mendorong kemandirian masyarakat dalam upaya mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah rumah tangga (Prianto, 2011). Dalam menanggulangi masalah sampah keterlibatan masyarakat untuk ikut berperan aktif secara individu, keluarga, kelompok masyarakat dengan mewujudkan kebersihan lingkungan.

Menurut Saputro (2013), bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah diantaranya :

1. Ikut serta dalam sosialisasi bank sampah dengan terlibat secara langsung dalam diskusi pada saat sosialisasi.
2. Ikut serta memberikan kontribusi dengan usaha mengumpulkan, memilah, dan menabung sampah dalam rangka mencapai tujuan kelompok.
3. Ikut serta dalam pelatihan pengelolaan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi alternatif pengelolaan limbah padat di negara berkembang dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Sekito *et al* (2013), pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Mumbai, India terbukti dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dan berkontribusi mengurangi timbulan sampah yang dibuang TPA serta menambah penghasilan masyarakat dari hasil pemilahan sampah.

2.7 Bank Sampah

Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah kering yang dilakukan secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di seluruh kegiatannya (Rozak, 2014). Sistem kegiatan bank sampah dilakukan dengan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah agar bernilai ekonomis sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari hasil menabung sampah. Semua kegiatan di dalam bank sampah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat (Warsito *et al*, 2018). Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13

tahun 2012, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut Radityaningrum *et al* (2017), bank sampah adalah salah satu bentuk pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat karena sudah ditangani langsung dari sumbernya. Sistem pengelolaan bank sampah sama seperti perbankan dengan memberikan buku tabungan hasil penjualan sampah yang sudah dikonversikan nilai rupiah. Konsep 3R yang telah diterapkan oleh bank sampah secara efektif mampu mengurangi timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sehingga memperpanjang umur penggunaan TPA.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup mengemukakan jumlah bank sampah yang ada di Indonesia sebanyak 1.195 unit yang telah dibangun di 55 kota di seluruh Indonesia (*Unilever*, 2013). Bank sampah muncul sebagai inisiatif masyarakat lokal dalam upaya partisipasi menangani permasalahan sampah. Bank sampah bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pembangunan bank sampah menjadi momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah. Pembentukan bank sampah memiliki tujuan utama yaitu membantu menangani pengolahan sampah yang ada di Indonesia, memberikan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat serta mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis (Warsito *et al*, 2018).

2.8 Mekanisme Sistem Bank Sampah

Bank sampah mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisahkan berdasarkan jenisnya, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat dicairkan dengan periode tertentu. Melalui bank sampah nasabah disyaratkan untuk memilah dan mengelompokkan sampah sesuai jenisnya. Adapun mekanisme sistem bank sampah adalah sebagai berikut :

a. Pemilahan sampah

Sebelum sampah disetorkan ke bank sampah nasabah harus memilah sampah sesuai jenisnya.

b. Penyetoran sampah

Waktu penyetoran sampah biasanya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Penjadwalan penyetoran sampah dilakukan ditentukan untuk menyamakan waktu nasabah melakukan penyetoran dan pengangkutan oleh pengepul agar sampah tidak bertumpuk di lokasi bank sampah. Sampah yang disetorkan ke bank sampah pada umumnya adalah sampah anorganik yang dapat di daur ulang serta dimanfaatkan sebagai kreasi sampah seperti tas, vas bunga, gantungan kunci, tempat tisu dan lain sebagainya. Sedangkan sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos.

c. Penimbangan

Sampah yang telah disetorkan ke bank sampah kemudian ditimbang sesuai jenis sampahnya. Berat sampah yang bisa disetorkan sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

d. Pencatatan

Pengelola sampah melakukan pencatatan jenis sampah dan berat sampah yang telah ditimbang.

e. Buku Tabungan

Hasil penimbangan dan pencatatan sampah tersebut, kemudian dikonversikan ke dalam nilai rupiah dan ditulis pada buku tabungan nasabah. Hasil penjualan dari sampah nantinya akan diambil pada waktu yang telah disepakati Bersama.

2.9 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak dapat terlepas dari karakteristik antar individu maupun pengaruh dari lingkungan eksternal individu. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah diantaranya :

1. Tingkat Pendidikan

Menurut penelitian Mulyadi *et al* (2010), menyatakan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimilikinya, semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan.

2. Pengetahuan

Pengetahuan mengenai pengelolaan sampah juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hal tersebut didukung dengan

penelitian yang telah dilakukan Warsito *et al* (2018), menyatakan kegiatan pendampingan menabung serta pelatihan tentang pengelolaan data persampahan pada bank sampah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemampuan mengolah data persampahan bagi pengurus bank sampah Sempulur Asri.

3. Pendapatan Perkapita

Kegiatan pengelolaan sampah memerlukan biaya operasional berupa pembayaran retribusi pelayanan sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah dari sumbernya menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan biaya pelayanan lain untuk menjaga kebersihan lingkungan.

4. Persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang sehat, bersih dan asri berpengaruh secara langsung pada partisipasi masyarakat. Semakin positif persepsi masyarakat terhadap lingkungan, maka semakin baik pula peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah.

5. Peran Pemerintah

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pengelolaan sampah dalam bentuk sosialisasi maupun penyebaran informasi. Sosialisasi berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya mengelola sampah, sehingga masyarakat dituntut untuk mengelola sampahnya dari sumbernya dengan menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Selain itu, peran pemerintah juga bertindak sebagai pengawas pengelolaan sampah.

6. Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah berfungsi untuk membantu proses pengelolaan sampah. Yolarita (2011) menyatakan, minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor yang membuat kurangnya partisipasi masyarakat.

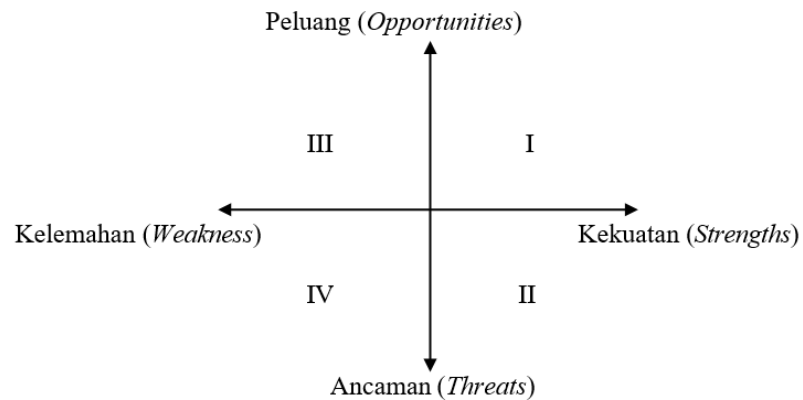
2.9 Analisis SWOT

SWOT adalah salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. SWOT merupakan akronim untuk kata-kata *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Oportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi, termasuk satuan bisnis tertentu, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan. Rangkuti (2005), menyatakan bahwa analisis SWOT mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis, untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada, yang secara bersamaan mampu meminimalkan kelemahan yang berasal dari *intern* dan ancaman yang timbul dari *ekstern* perusahaan.

Teknis perumusan strategi yang digunakan untuk membantu menganalisa, mengevaluasi dan memilih strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu : (1) tahap mengumpulkan data yang meringkas informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi, (2) tahap pencocokan, berfokus pada

strategi alternatif yang layak dengan memadukan faktor-faktor eksternal dan internal, (3) tahap keputusan, merupakan tahap untuk memilih strategi yang spesifik dan terbaik dari berbagai strategi alternatif yang ada untuk diimplementasikan. Dengan demikian faktor-faktor strategis perusahaan dengan menggunakan matriks SWOT dapat menggambarkan dengan jelas peluang dan ancaman dari luar yang dihadapi, yang kemudian harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Matriks ini menghasilkan empat set alternatif strategis, yaitu strategi SO, strategi ST, strategi WO dan strategi WT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal digolongkan ke dalam matriks faktor strategi internal atau IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*), sedangkan faktor eksternal digolongkan ke dalam matriks faktor strategi eksternal atau EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analysis Summary*) (David, 2006).

Setelah identifikasi faktor internal dan eksternal dilakukan, hasil perhitungan data SWOT kuantitatif dapat digunakan untuk mengetahui secara pasti posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran analisis SWOT (Gambar 1). Titik (x,y) ditentukan dengan cara mengurangi poin opportunities dengan threats untuk menghasilkan titik Y. Kemudian dilanjutkan dengan mengurangi strength dengan weaknesses untuk menghasilkan titik X.



Sumber: Rangkuti (2014)

Gambar 2.1. Kuadran analisis SWOT

Keterangan :

Kuadran I : Mendukung strategi agresif Situasi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Kuadran II : Mendukung strategi diversifikasi Perusahaan masih memiliki kekuatan internal meskipun menghadapi berbagai ancaman. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang sebagai strategi diversifikasi.

Kuadran III : Mendukung strategi turn-around Pada kondisi ini perusahaan memiliki peluang pasar yang sangat besar namun memiliki beberapa kendala/kelemahan internal. Perusahaan harus meminimalkan masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran IV : Mendukung strategi defensif Kondisi ini sangat tidak menguntungkan, perusahaan harus menghadapi beberapa ancaman dan kelemahan internal.

